

KATA PENGANTAR

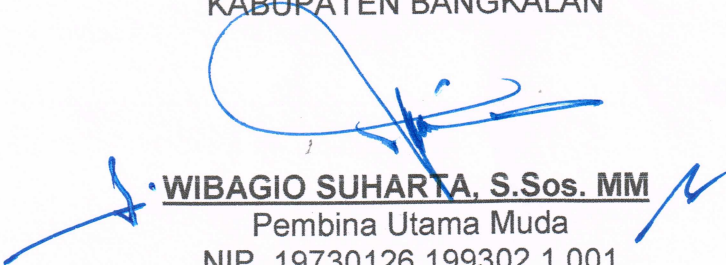
Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 merupakan dokumen sebagai dasar dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta mempunyai orientasi pada hasil yang diharapkan.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja PD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis, Dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2022, untuk mereviu hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu serta perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan.

Bangkalan, 2 Agustus 2021

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BANGKALAN



WIBAGIO SUHARTA, S.Sos. MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19730126 199302 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
 Bab II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH	
TAHUN LALU	6
2.1. Evaluasi Pelaksaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu Dan Capaian Renstra	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan	12
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas & Fungsi	12
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD	12
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	25
 Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	27
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	27
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja.....	28
 Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	29
4.1 Program dan Kegiatan	30
 BAB V PENUTUP	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kinerja (Renja) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, yang selanjutnya akan diproses menjadi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari RKPD dan Renstra yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan Renja juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Bangkalan. Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 ini berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 dan evaluasi kinerja di tahun sebelumnya dan diharapkan bisa memicu kinerja pada tahun yang akan datang.

1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Kerja 2022 Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 5679);
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No. 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahab Kedua Atas Peraturan Mengeri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- f. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor Tahun tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Sosial Republik Indonesia;

- g. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1/D);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2014 Nomor 1/D);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 Nomor);
- l. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2018 – 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 Nomor);
- m. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 Nomor);
- n. Peraturan Bupati Bangkalan nomor 41 tahun 2016 kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan 2022 adalah memberikan gambaran strategis tentang arah program kerja, rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif selama 1 (satu) tahun kedepan

Sedangkan tujuan penyusunan rencana kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Rencana Kerja 2022 yang berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 serta evaluasi kinerja di tahun 2021 dapat memicu pada rencana kerja tahun yang akan datang.
2. Memberikan arah pembangunan urusan Sosial di Kabupaten Bangkalan selama 1 (satu) tahun kedepan.
3. Membantu dalam mencapai visi dan misi Dinas Sosial dan Kabupaten Bangkalan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, RENSTRA 2018-2023 dan RKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) 2022 maka dapat ditetapkan Sistematika penulisan dengan disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas Sosial, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Memuat tentang Renja, Proses Penyusunan Renja, Keterkaitan antara Renja dengan Dokumen RKPD, Renstra PD dengan Renja.

1.2. Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi Renja Tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD.

3.3. Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2020 dan Capaian Renstra

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan selama tahun 2019 dan perkiraan target tahun 2020.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial
dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2021

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (renstra perangkat daerah) tahun 2023	Realisasi Target Kinerja hasil Program (outcome) dan Keluaran Kegiatan (output) s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar									
1.06	Urusan Sosial									
1.06.01.16.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Persentase anak terlantar, disabilitas dan lansia bermasalah sosial yang terlayani	3,1 %		2,7 %	%	0		0 %	
1.06.01.16.14	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut usia	Jumlah anak terlantar dan lansia yang terlayani dan direhab	320 orang	58 org	363 4 org	363 4 org	100		3692 org	11,5
1.06.01.16.15	Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang tuna sosial	Jumlah tuna sosial yang dilayani dan direhabilitasi	635 orang	161 org	23 org	60 org	260,9		221 org	0,3

1.06.01.16.16	Pelayanan dan rehabilitasi sosial disabilitas	Jumlah disabilitas yang dilayani dan direhab	199 orang	36 org	0 org	367 org	100		403 org	2,0
1.06.01.23.	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Fakir miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	0,6 %		0,6 %	%	0		%	
1.06.01.23.01	Penanganan Fakir Miskin	Jumlah fakir miskin yang dibina	663 orang	120 orang	0 org	0 org	0		120 org	0,2
		Jumlah keluarga miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	348 1 orang	126 0 orang	979 3 org	979 3 org	100		11053 org	3,2
		Dokumen penerima rastra	5 dok	1 dok	1 dok	dok	0		1 dok	0,2
1.06.01.23.02	Kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial	Jumlah sarana yang dipelihara	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	100		2 lokasi	2,0
		Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar nasional	2 kegiatan	2 keg	2 keg	0 keg	0		2 keg	1,0
1.06.01.23.03	Pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat dan pengelolaan sumber daya sosial	Jumlah lembaga yang dibantu	28 lembaga	0 lembaga	0 lembaga	0 lembaga	0		0	0,0
		Jumlah TSK yang terbina	18 orang	18 orang	18 org	18 org	100		36 org	2,0
1.06.01.24.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase penerima manfaat program perlindungan dan jaminan sosial	100 %		100 %	%			%	

1.06.01.24.01	Perlindungan sosial korban bencana alam	persentase korban bencana alam yang dibantu	100 %	100 %	100 %	%	0		100 %	1,0
		Jumlah daerah rawan kekeringan yang dibantu	89 desa	38 desa	89 desa	38 desa	42,7		76 desa	0,9
1.06.01.24.02	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dokumen penerima KPM	5 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100		2 dok	0,4
		Data kemiskinan	5 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100	-	2 dok	0,4
1.06.01.24.03	Perlindungan sosial korban bencana sosial	% korban bencana sosial yang dibantu	100 %	100 %	100 %	100 %	100		200 %	2,0
1.06.01.25.	Program Pengembangan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	6 %	6 %	%	%			%	
1.06.01.25.01.	Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Jumlah LKS yang dibantu	28 lembaga	5 lembaga	0 lembaga	0 lembaga	0		5	0,2
1.06.01.25.02.	Pengembangan Publikasi dan Penyuluhan Sosial	Jumlah PSM yang telah dibina	277 orang	90 orang	0 orang	0 orang	0		90	0,3
1.06.01.25.03.	Pengembangan Kerja sama dan Kapasitas Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah PSKS yang dibina	110 orang	70 orang	0 orang	0 orang	0		70	0,6

0.00.16.	Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	100 %	100 %	100 %	%			%	
									100	
0.00.16.01.	Penyediaan barang dan jasa perkantoran	Jumlah jenis barang perkantoran yang disediakan	35 jenis	7 jenis	7 jenis	7 jenis	100		14 jenis	0,4
		Jumlah jenis jasa perkantoran yang disediakan	45 jenis	9 jenis	9 jenis	9 jenis	100		18 jenis	0,4
0.00.16.02.	Kedinasan dalam daerah dan luar daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan	155 kali	41 kali	25 kali	25 kali	100		66 kali	0,4
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan	380 kali	60 kali	80 kali	80 kali	100		140 kali	0,4
0.00.16.03.	Pengelolaan dan Pelaksanaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah yang tersusun	64 dokumen	0 dok	14 dok	14 dok	100		14 dok	0,2
0.00.16.04.	Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah jenis sarana aparatur yang dipelihara	20 jenis	16 jenis	3 jenis	3 jenis	100		19 jenis	1,0
		Jumlah jenis prasarana aparatur yang dipelihara	5 unit	2 unit	1 unit	1 unit	100		3 unit	0,6
0.00.16.05.	Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah jenis sarana aparatur yang diadakan	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100		4 unit	2,0
0.00.16.06.	Peningkatan Disiplin Pegawai	Jumlah pakaian aparatur yang diadakan	400 buah	0 buah	100 buah	100 buah	100		100 buah	0,3

0.00.16.08.	Penyusunan perencanaan dan informasi PD	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	14 dok	4 dok	2 dok	2 dok	100		6 dok	0,4
		Jumlah dokumen penganggaran yang tersusun (RKA dan DPA)	20 dok	4 dok	2 dok	2 dok	100		6 dok	0,3
0.00.16.09.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja PD	Jumlah laporan triwulan & semesteran monev PD yang tersusun (Renja/RKPD, APBD)	46 laporan	12 laporan	6 laporan	6 laporan	100		18 laporan	0,4
		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD yang tersusun	5 laporan	2 laporan	1 laporan	1 laporan	100		3 laporan	0,6
0.00.16.10.	Penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan PD yang tersusun per semester / prognosis / akhir tahun	2 dok	0 dok	2 dok	2 dok	100		2 dok	1,0
		Jumlah laporan keuangan PD yang tersusun mingguan/bulanan/triwulan/semester	264 laporan	4 laporan	2 dok	2 dok	100		6	0,0
		Laporan Keuangan akhir tahun	4 dok	2 dok	1 dok	1 dok	100		3	0,8
0.00.16.11.	Fasilitasi peringatan hari jadi kabupaten/Provinsi	Jumlah kegiatan peringatan hari jadi dan hari besar yang difasilitasi	9 kegiatan	2 keg	1 keg	1 keg	100		3 keg	0,3

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Evaluasi Perangkat Daerah

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	I K K	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	6	7	8			9	10	11	12	13
1	Indikator Tujuan Jumlah PMKS			567.284	567.205	567.111	566.999	566.869	539.162	501.674	567.111	566.999	
1	Indikator Sasaran Persentase PMKS yang dibina dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya			6,69	7,81	8,93	10,04	11,16	6	7	8,93	10,04	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Keterbatasan sumber daya manusia dan kelembagaan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
2. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
3. Keterbatasan sumberdana pembiayaan dalam penanganan kesejahteraan sosial
4. Keterbatasan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Kompleksitas permasalahan PMKS yang membutuhkan koordinasi dan sinkronisasi serta kerja sama dengan lembaga lain/lintas sektoral (sesuai dengan UU. No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dan UU No. 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin)

2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Reviu terhadap rancangan awal RKPD tahun 2022 terhadap hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022
Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100%	7.955.738.050	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100%	7.955.738.050	
I	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang terlaksana	100%	80.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang terlaksana	100%	80.000.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	3 dokumen	35.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	3 dokumen	35.000.000	
2	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	2 dokumen	7.500.000	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	2 dokumen	7.500.000	
3	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	2 dokumen	7.500.000	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	2 dokumen	7.500.000	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	2 dokumen	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	2 dokumen	7.500.000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	2 dokumen	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	2 dokumen	7.500.000	

6	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1 dokumen	7.500.000	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1 dokumen	7.500.000	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	8 laporan	7.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	8 laporan	7.500.000	
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	4.617.906.640	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	4.617.906.640	
8	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	49 orang/bulan	4.587.906.640	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	49 orang/bulan	4.587.906.640	
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah bahan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 laporan	7.500.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah bahan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 laporan	7.500.000	
10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Laporan Pelaksanaan Akuntansi SKPD yang tersusun	1 laporan	7.500.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Laporan Pelaksanaan Akuntansi SKPD yang tersusun	1 laporan	7.500.000	
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	7.500.000	
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan PD yang tersusun mingguan/bulanan/triwulan/semesteran	66 laporan	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan PD yang tersusun mingguan/bulanan/triwulan/semesteran	66 laporan	7.500.000	
III	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Persentase administrasi barang milik daerah yang terlaksana	100%	15.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Persentase administrasi barang milik daerah yang terlaksana	100%	15.000.000	

13	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun	1 laporan	7.500.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun	1 laporan	7.500.000	
14	Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 laporan	7.500.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 laporan	7.500.000	
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	200.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	200.000.000	
15	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai		Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 unit	15.000.000	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai		Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 unit	15.000.000	
16	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	90 buah	50.000.000	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	90 buah	50.000.000	
17	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Laporan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian yang tersusun	7 Laporan	7.500.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Laporan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian yang tersusun	7 Laporan	7.500.000	
18	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yang tersusun	12 Laporan	7.500.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yang tersusun	12 Laporan	7.500.000	
19	Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan		Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan / bimtek / sosialisasi / seminar	90 Orang	120.000.000	Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan		Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan / bimtek / sosialisasi / seminar	90 Orang	120.000.000	
V	Administrasi Umum Perangkat daerah		Persentase administrasi umum yang terlaksana	100%	392.500.000	Administrasi Umum Perangkat daerah		Persentase administrasi umum yang terlaksana	100%	392.500.000	
20	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	44 unit	5.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	44 unit	5.000.000	

21	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19 unit	5.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19 unit	5.000.000	
22	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	165 unit	5.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	165 unit	5.000.000	
23	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4 jenis	100.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4 jenis	100.000.000	
24	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 jenis	50.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 jenis	50.000.000	
25	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan		Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 jenis	5.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan		Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 jenis	5.000.000	
26	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	25 kali	15.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	25 kali	15.000.000	
27	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110 kali	200.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110 kali	200.000.000	
28	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah laporan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yang tersusun	1 laporan	7.500.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah laporan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yang tersusun	1 laporan	7.500.000	
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pengadaan barang milik daerah yang terlaksana	100%	458.515.600	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pengadaan barang milik daerah yang terlaksana	100%	458.515.600	
29	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah jenis sarana aparatur yang diadakan	1 unit	458.515.600	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah jenis sarana aparatur yang diadakan	1 unit	458.515.600	
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang yang terlaksana	100%	1.411.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang yang terlaksana	100%	1.411.000.000	

30	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 jenis	150.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 jenis	150.000.000	
31	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 jenis	61.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 jenis	61.000.000	
32	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3 jenis	1.200.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3 jenis	1.200.000.000	
VII I	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang terlaksana	100%	780.815.810	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang terlaksana	100%	780.815.810	
33	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	2 unit	348.000.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	2 unit	348.000.000	
34	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	19 unit	343.035.810	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	19 unit	343.035.810	
35	Pemeliharaan mebel		Jumlah Mebel yang dipelihara	4 unit	780.000	Pemeliharaan mebel		Jumlah Mebel yang dipelihara	4 unit	780.000	
36	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	60.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	60.000.000	
37	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	63 unit	29.000.000	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	63 unit	29.000.000	

B	Program Pemberdayaan Sosial		% PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang direhab dan berhasil		860.000.000	Program Pemberdayaan Sosial		% PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang direhab dan berhasil		860.000.000	
IX	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		% Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang telah dibina dan dibantu		860.000.000	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		% Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang telah dibina dan dibantu		860.000.000	
38	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah (Pekerja Sosial Masyarakat) PSM yang telah dibina	50 orang	50.000.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah (Pekerja Sosial Masyarakat) PSM yang telah dibina	50 orang	50.000.000	
39	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah TSKS yang dibina	18 orang	250.000.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah TSKS yang dibina	18 orang	250.000.000	
40	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang dibina Laporan hasil monitoring	50 lembaga 1 dokumen	500.000.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang dibina Laporan hasil monitoring	50 lembaga 1 dokumen	500.000.000	
41	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang dibantu	6 lembaga	60.000.000	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang dibantu	6 lembaga	60.000.000	
C	Program Rehabilitasi Sosial		% PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang direhab dan berhasil		2.175.000.000	Program Rehabilitasi Sosial		% PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang direhab dan berhasil		2.175.000.000	

X	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		% Keluarga Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat yang dibimbing		2.090.000.000	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		% Keluarga Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat yang dibimbing		2.090.000.000	
42	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		Jumlah keluarga anak terlantar, lanjut usia yang dibimbing Jumlah keluarga penyandang disabilitas yang dibimbing	64 orang 40 orang	90.000.000	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		Jumlah keluarga anak terlantar, lanjut usia yang dibimbing Jumlah keluarga penyandang disabilitas yang dibimbing	64 orang 40 orang	90.000.000	
43	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		Laporan masyarakat miskin yang difasilitasi dalam sistem layanan rujukan terpadu (SLRT)	1 dokumen	2.000.000.000	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		Laporan masyarakat miskin yang difasilitasi dalam sistem layanan rujukan terpadu (SLRT)	1 dokumen	2.000.000.000	
XI	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial		% Keluarga Tuna Sosial yang difasilitasi		85.000.000	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial		% Keluarga Tuna Sosial yang difasilitasi		85.000.000	
44	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza		Jumlah Gelandangan Pengemis dan Masyarakat yang dibimbing	139 orang	85.000.000	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza		Jumlah Gelandangan Pengemis dan Masyarakat yang dibimbing	139 orang	85.000.000	
D	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		% keluarga fakmis yang terlindungi dan memiliki jaminan sosial		2.800.000.000	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		% keluarga fakmis yang terlindungi dan memiliki jaminan sosial		2.800.000.000	

XII	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		% keluarga fakir miskin yang didata dan difasilitasi		2.800.000.000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		% keluarga fakir miskin yang didata dan difasilitasi		2.800.000.000	
45	Pendataan Fakir Miskin cakupan daerah kabupaten/kota		Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan sosial	1350 orang	2.000.000.000	Pendataan Fakir Miskin cakupan daerah kabupaten/kota		Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan sosial	1350 orang	2.000.000.000	
46	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Dokumen Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi PKH Laporan Hasil Rekonsiliasi Bantuan Sosial PKH SDM PKH yang difasilitasi	1 dokumen 2 laporan 2 laporan 250 orang	800.000.000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Dokumen Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi PKH Laporan Hasil Rekonsiliasi Bantuan Sosial PKH SDM PKH yang difasilitasi	1 dokumen 2 laporan 2 laporan 250 orang	800.000.000	
E	Program Penanganan Bencana		% korban bencana yang difasilitasi	100%	550.000.000	Program Penanganan Bencana		% korban bencana yang difasilitasi	100%	550.000.000	
XII I	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota		% korban bencana yang difasilitasi	100%	300.000.000	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota		% korban bencana yang difasilitasi	100%	300.000.000	
47	Penyediaan makanan		persentase korban bencana alam yang di fasilitasi persentase korban bencana sosial yang difasilitasi	100 % 100 %	300.000.000	Penyediaan makanan		persentase korban bencana alam yang di fasilitasi persentase korban bencana sosial yang difasilitasi	100 % 100 %	300.000.000	
XI V	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Persentase Forum Komunikasi Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang difasilitasi	100%	250.000.000	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Persentase Forum Komunikasi Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang difasilitasi	100%	250.000.000	

48	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana		Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana	30 orang	250.000.000	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana		Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana	30 orang	250.000.000	
F	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		% Taman Makam Pahlawan yang terkelola	100%	500.000.000	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		% Taman Makam Pahlawan yang terkelola	100%	500.000.000	
XV	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota		% Taman Makam Pahlawan terpelihara	100%	500.000.000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota		% Taman Makam Pahlawan terpelihara	100%	500.000.000	
49	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota		Jumlah sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan (TMP) yang dipelihara	1 lokasi	200.000.000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota		Jumlah sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan (TMP) yang dipelihara	1 lokasi	200.000.000	
50	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar nasional	2 kegiatan	300.000.000	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar nasional	2 kegiatan	300.000.000	
					14.840.738.050					14.840.738.050	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2022 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Tahun 2022 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2022.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah Propinsi Jawa Timur, dalam konteks perencanaan pembangunan, Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan dasar penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Dinas Sosial dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu program yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat secara umum khususnya Dinas Sosial.

Proses penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2022 didasarkan pada program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2022, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

Tabel 2.4
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	BESARAN / VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi

Perkembangan kemiskinan yang menggambarkan dinamika kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan, dipengaruhi oleh berbagai faktor secara simultan termasuk perkembangan perekonomian Indonesia, integrasi perekonomian Indonesia secara global, perubahan demografi, dan kebijakan afirmatif yang dilaksanakan. Selama kurun waktu beberapa tahun terakhir, tingkat kemiskinan berhasil diturunkan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa berbagai program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan dalam bentuk 4 kelompok program (klaster), yaitu bantuan dan jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha mikro kecil dan program-program pro rakyat telah berjalan dengan cukup baik. Meskipun demikian kecepatan penurunan kemiskinan mengalami perlambatan.

Dalam rangka penurunan kemiskinan tersebut, pertumbuhan dan kemajuan sosial ekonomi masyarakat serta perubahan struktur perekonomian Indonesia memiliki 2 konsekuensi penting, yaitu (1) penduduk golongan menengah kebawah akan semakin membutuhkan sistem perlindungan yang komprehensif; dan (2) adanya potensi meningkatnya kesenjangan antar kelompok miskin dan non miskin yang menjadikan masalah sosial semakin kompleks.

Perlindungan sosial diperlukan agar penduduk miskin dan rentan dilindungi pemenuhan kebutuhannya, terutama pelayanan kesehatan dan kebutuhan bahan pokok, apabila terjadi guncangan ekonomi maupun sosial. Dalam mengurangi potensi kesenjangan antar kelompok maka perlu dilakukan upaya perluasan akses terhadap pelayanan dasar. Sedangkan upaya yang bisa dilakukan untuk mengurai kompleksitas permasalahan kemiskinan dengan pembekalan keterampilan wirausaha maupun keterampilan teknis kepada penduduk miskin dan rentan, sehingga dapat meningkatkan daya saing mereka melalui kegiatan ekonomi produktif.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja PD

Dalam rangka mewujudkan Misi Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan, maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran strategis yang dituangkan dalam Renja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2022.

Tujuan Renja Dinas Sosial

1. Menurunnya PPKS dalam rangka berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan

Sasaran Renja Dinas Sosial

1. Meningkatnya pelayanan terhadap PPKS

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

TUJUAN				SASARAN				KET
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		
		2021	2022			2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Menurunnya PMKS dalam rangka berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan	Jumlah PMKS	567.111	566.999	Meningkatnya pelayanan terhadap PMKS	% PMKS yang mendapatkan pelayanan sosial dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya	8,93	10,04	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai dinas daerah yang melaksanakan pembangunan di bidang sosial, Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan dituntut untuk menghasilkan kegiatan yang menunjang pembangunan daerah yang berkualitas.

4.1. Program dan kegiatan Dinas Sosial tahun 2022 :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022
Dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome) / KEGIATAN (output)	RENCANA TAHUN 2022 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	Dinsos	100%	7.556.821.342	DAUM			7.996.702.240
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang terlaksana		100%	55.000.000	DAUM			80.000.000
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun		3 dokumen	25.000.000	DAUM		3 dokumen	35.000.000
1.06.01.2.01.02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun		2 dokumen	5.000.000	DAUM		2 dokumen	7.500.000
1.06.01.2.01.03	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun		2 dokumen	5.000.000	DAUM		2 dokumen	7.500.000
1.06.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun		2 dokumen	5.000.000	DAUM		2 dokumen	7.500.000
1.06.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun		2 dokumen	5.000.000	DAUM		2 dokumen	7.500.000

1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun		1 dokumen	5.000.000	DAUM		1 dokumen	7.500.000
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun		8 laporan	5.000.000	DAUM		8 laporan	7.500.000
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi		100%	4.245.762.142	DAUM		100%	4.617.906.640
1.06.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN		49 orang/bulan	4.225.762.142	DAUM		49 orang/bulan	4.587.906.640
1.06.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bahan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 berkas	5.000.000	DAUM		1 berkas	7.500.000
1.06.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Akuntansi SKPD yang tersusun		1 laporan	5.000.000	DAUM		1 laporan	7.500.000
1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun		1 dokumen	5.000.000	DAUM		1 dokumen	7.500.000
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan PD yang tersusun mingguan/bulanan/triwulanan/semesteran		66 laporan	5.000.000	DAUM		66 laporan	7.500.000
1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang milik daerah yang terlaksana		100%	6.000.000	DAUM		100%	15.000.000
1.06.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun		1 laporan	3.000.000	DAUM		1 laporan	7.500.000
1.06.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		14 laporan	3.000.000	DAUM		14 laporan	7.500.000

1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana		100%	107.000.000	DAUM		100%	200.000.000
1.06.01.2.05.01	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		1 unit	10.000.000	DAUM		1 unit	15.000.000
1.06.01.2.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Peserta Atribut Kelengkapannya		90 buah	44.570.000	DAUM		90 buah	50.000.000
1.06.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian yang tersusun		7 Laporan	3.000.000	DAUM		7 Laporan	7.500.000
1.06.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yang tersusun		12 Laporan	3.000.000	DAUM		12 Laporan	7.500.000
1.06.01.2.05.11	Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan / bimtek / sosialisasi / seminar		90 Orang	46.510.000	DAUM		90 Orang	120.000.000
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat daerah	Persentase administrasi umum yang terlaksana		100%	337.578.300	DAUM		100%	492.500.000
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		44 unit	3.495.500	DAUM		44 unit	5.000.000
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		19 unit	30.053.800	DAUM		19 unit	5.000.000
1.06.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		165 unit	5.009.000	DAUM		165 unit	5.000.000
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor		4 jenis	39.980.000	DAUM		4 jenis	150.000.000
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		2 jenis	50.000.000	DAUM		2 jenis	50.000.000

1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		2 jenis	3.240.000	DAUM		2 jenis	5.000.000
1.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu		25 kali	15.000.000	DAUM		25 kali	15.000.000
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		110 kali	150.000.000	DAUM		110 kali	250.000.000
1.06.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah laporan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yang tersusun		1 laporan	40.800.000	DAUM		1 laporan	7.500.000
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang terlaksana		100%	748.170.900	DAUM		100%	458.515.600
1.06.01.2.07.10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah jenis sarana aparatur yang diadakan		1 unit	748.170.900	DAUM		39 unit	458.515.600
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang terlaksana		100%	1.302.370.000	DAUM		100%	1.350.000.000
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		3 jenis	125.000.000	DAUM		3 jenis	150.000.000
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		3 jenis	1.177.370.000	DAUM		3 jenis	1.200.000.000
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang terlaksana		100%	754.860.000	DAUM		100%	782.780.000

1.06.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan		2 unit	349.410.000	DAUM		2 unit	348.000.000
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan		19 unit	315.030.000	DAUM		19 unit	345.000.000
1.06.01.2.09.05	Pemeliharaan mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara		4 unit	1.420.000	DAUM		4 unit	780.000
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi		1 unit	60.000.000	DAUM		1 unit	60.000.000
1.06.01.2.09.10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		63 unit	29.000.000	DAUM		63 unit	29.000.000
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	% PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang direhab dan berhasil	Bangkalan		520.000.000	DAUM			720.000.000
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	% Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang telah dibina dan dibantu			520.000.000	DAUM			720.000.000
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah (Pekerja Sosial Masyarakat) PSM yang telah dibina		50 orang	50.000.000	DAUM		50 orang	50.000.000
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TSKS yang dibina		18 orang	110.000.000	DAUM		18 orang	110.000.000

1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang dibina Laporan hasil monitoring		50 lembaga 1 dokumen	300.000.000	DAUM		50 lembaga 1 dokumen	500.000.000
1.06.02.2.03.04	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang dibantu		6 lembaga	60.000.000	DAUM		6 lembaga	60.000.000
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	% Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Bangkalan		772.829.700	DAUM			795.000.000
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti			671.618.100	DAUM			700.000.000
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah keluarga anak terlantar, lanjut usia yang dibimbing Jumlah keluarga penyandang disabilitas yang dibimbing		64 orang 40 orang	71.618.100	DAUM		70 orang 44 orang	100.000.000
1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Laporan masyarakat miskin yang difasilitasi dalam sistem layanan rujukan terpadu (SLRT)		1 dokumen	600.000.000	DAUM		1 dokumen	600.000.000
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	% Keluarga Tuna Sosial yang difasilitasi			101.211.600	DAUM			95.000.000

1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza	Jumlah Gelandangan Pengemis dan Masyarakat yang dibimbing		139 orang	101.211.600	DAUM		139 orang	95.000.000
1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	% keluarga fakmis yang terlindungi dan memiliki jaminan sosial	Bangkalan		1.814.085.300	DAUM			2.850.000.000
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	% keluarga fakir miskin yang didata dan difasilitasi			1.814.085.300	DAUM			2.850.000.000
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan sosial		1980 orang	1.314.085.300	DAUM		1350 orang	2.000.000.000
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi PKH Laporan Hasil Rekonsiliasi Bantuan Sosial PKH SDM PKH yang difasilitasi		1 dokumen 2 laporan 2 laporan 250 orang	500.000.000	DAUM		1 dokumen 2 laporan 2 laporan 250 orang	850.000.000
1.06.06	Program Penanganan Bencana	% korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Bangkalan	100%	806.216.450	DAUM			500.000.000
1.06.06.2.01	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	% korban bencana alam dan sosial yang difasilitasi kebutuhan dasarnya		100%	679.366.250	DAUM			350.000.000
1.06.06.2.01.01	Penyediaan makanan	persentase korban bencana alam yang difasilitasi persentase korban bencana sosial yang difasilitasi		100 % 100 %	679.366.250	DAUM		100 % 100 %	350.000.000
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Forum Komunikasi Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang difasilitasi		100%	126.850.200	DAUM			150.000.000

1.06.06.2.02.02	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana		30 orang	126.850.200	DAUM		30 orang	150.000.000
1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	% Taman Makam Pahlawan yang terkelola	Bangkalan	100%	264.561.950	DAUM			500.000.000
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	% Taman Makam Pahlawan terpelihara		100%	264.561.950	DAUM			500.000.000
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan (TMP) yang dipelihara		1 lokasi	140.000.000	DAUM		1 lokasi	200.000.000
1.06.07.2.01.03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar nasional		2 kegiatan	124.561.950	DAUM		2 kegiatan	300.000.000
	JUMLAH				11.734.514.742				13.361.702.240

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan 2018 – 2023 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Bupati Bangkalan, serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2022.

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu. Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2022, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama perangkat daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan maupun dengan perangkat daerah yang membidangi fungsi lain.

Oleh karena eskalasi permasalahan sosial yang terus berkembang maka diperlukan reposisi prioritas dan arah pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bangkalan, maka pada tahun 2022 lebih difokuskan pada program sebagai berikut :

- a. Program Pemberdayaan Sosial
- b. Program Rehabilitasi Sosial
- c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- d. Program Penanganan Bencana

Prioritas tersebut di atas penting untuk mendapatkan perhatian dalam perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial tahun 2022, karena terkait dengan hal tersebut akan menimbulkan implikasi sebagai berikut :

1. Bahwa penanganan dan pelayanan sosial terhadap PMKS sesungguhnya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran terbuka, peningkatan indeks pembangunan manusia. Oleh karenanya peningkatan penyediaan alokasi anggaran untuk

penanganan kemiskinan menjadi sangat strategis dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

2. Program-program penanganan PMKS pada hakekatnya merupakan upaya untuk mencegah berkembang dan mengurangi populasi PMKS sekaligus menekan eksekse-eksekse yang ditimbulkan. Oleh karenanya Program tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan, terpadu dan didukung oleh ketersediaan anggaran yang memadai.
3. Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat dari bencana alam, bencana sosial maupun bencana teknologi perlu disiapkan sebuah sistem pengelolaan pencegahan dan penanganan bencana secara terpadu. Oleh karenanya sistem pencegahan ini melalui pengembangan manajemen pengelolaan bencana berbasis masyarakat yang salah satunya adalah pembinaan terhadap TAGANA (Taruna Siaga Bencana), TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), serta penguatan kelembagaan dalam pengelolaan bencana harus dilakukan.
4. Dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan yang profesional dan manusiawi dibutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

Selain persoalan terkait dengan program prioritas kesejahteraan sosial di atas hal-hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa penyediaan pelayanan harus merespon perubahan paradigma dan trend permasalahan sosial yang berkembang. Oleh karena itu diperlukan hal-hal sebagai berikut:

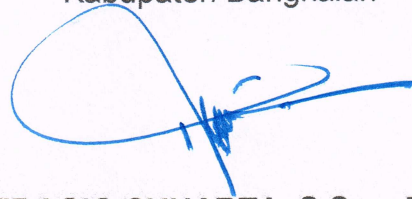
1. Bahwa pembangunan kesejahteraan sosial harus berorientasi pada pembangunan yang berbasis masyarakat (*community base*).
2. Peningkatan kualitas aparatur dalam penyiapan pelayanan dan perlindungan bagi korban tindak kekerasan, korban trafficking, korban penelantaran dan eksploitasi serta kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

Demikian Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan tahun 2022 ini disusun sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan penganggaran pembangunan kesejahteraan sosial tahun 2022.

Bangkalan, 2 Agustus 2021

Kepala Dinas Sosial

Kabupaten Bangkalan



 **WIBAGIO SUHARTA, S.Sos. MM.** 
Pembina Utama Muda
NIP. 197301261993021001